

ISLAM DALAM PEMERINTAHAN KERAJAAN BONE PADA ABAD XVII

Oleh:

Rahmawati

email: rahmawati.harisa@yahoo.com

Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar

Asbtrak

Tulisan ini membahas Islam dalam pemerintahan kerajaan Bone pada abad ke-17. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat Bone dalam pemerintahan ketika Islam diperkenalkan oleh raja bisa dikatakan sangat cepat dan tidak mendapat halangan dari masyarakat maupun dari raja yang turut memberikan impak untuk menghindari konflik antara adat dan *sara*. Sementara itu bagi masyarakat Bone, realitas keislaman sebenarnya jauh lebih kompleks dari gambaran tersebut. Disatu sisi, agama Islam memang telah menjadi sebahagian dan hadir dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan sosial masyarakat Bone. Hal ini dapat dilihat pada praktik peribadatan mereka, nama-nama Muslim yang mereka sandang, kewujudan berbagai macam kegiatan sosial Islam dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan sebagainya.

Kata kunci: Islamisasi, Kerajaan Gowa dan Bone, Sejarah

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia walaupun berlangsung beberapa abad yang lalu bahkan sampai saat ini masih terus mengalami perkembangan. Sebagaimana dalam pergulatan politik di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-18 seperti Gowa, Bone, Luwu, Wajo dan Soppeng, secara umum dijadikan barometer tentang keadaan politik masyarakat Sulawesi Selatan. Situasi gerakan politik pada abad ini masih dalam suasana yang membimbangkan hal ini ditandai dengan peristiwa peperangan antar sesama kerajaan-kerajaan itu sendiri.

Sebagaimana pendapat ahli sejarah bahwa Islam telah masuk di negeri Bone pada awal Abad ke-13. Hal ini ditandai dengan beberapa temuan berupa batu nisan dan beberapa benda-benda lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Adapun dalam perkembangan selanjutnya Islam di Kerajaan Bone di mulai dengan diterimanya Islam sebagai agama rasmi kerajaan pada awal abad ke 17 M. Meskipun pada awalnya menolak, namun pada akhirnya mengalami perkembngan dengan memantapkan Islam

sebagai keyakinan yang menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat Bone. Namun dalam pembahasan ini penulis berada pada perkembangan Islam pada abad ke 17, yang merupakan rangkaian dari perkembangan yang terjadi di kerajaan Bone itu sendiri

Perkembangan Islam selanjutnya semakin kuat dengan tampilnya seorang raja yang juga seorang ulama, yaitu Latenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin (1775-1821) adalah pengikut tarekat Khalwatiyah Yusufiyah salah satu tarekat yang berkembang di Sulawesi Selatan yang di bawah oleh Syekh Yusuf, Hingga Latenritappu ini bahkan berkunjung dan tinggal di Maros untuk memperdalam ilmu tasawuf lewat tarekat Khalwatiyah Yusufiyah.¹

A. *Penerimaan Islam pada Kerajaan Bone*

Proses penerimaan Islam di kerajaan Bone pada awalnya tidak terlepas dari proses Islamisasi di kerajaan Gowa, yang mana proses Islamisasi kerajaan Gowa, dilakukan oleh Datu ri Bandang yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin setelah Islam diterima secara resmi oleh Kerajaan Gowa. Seruan pengislama yang dibawah Sultan Alauddin didasarkan atas konvensi raja-raja terdahulu yang dimuat dalam konvensi *Uluada* (perjanjian) yang menegaskan bahawa setiap penguasa yang menemukan suatu jalan baru, dan lebih baik, berkewajiban memberi tahu para penguasa lainnya mengenai penemuannya tersebut kepada raja-raja sekutunya.²

Ajakan Sultan Alauddin tampaknya secara pribadi dapat diterima oleh raja Bone, La Tenriruwa, tetapi anggota Dewan Ade Pitu menolak ajakan itu, tentu sangat mengecewakan Raja Bone ke 11 dan kesetiaan rakyatnya yang mulai memudar, pengingkaran dari perjanjian leluhur. Raja Bone bersama permaisurinya serta rakyat yang masih setia kepadanya meninggalkan Lalebbata, berangkat ke Pattiro. Di tempat ini Raja Bone menyerukan kepada rakyatnya untuk mengikuti ajaran Islam, namun hasilnya tetap sama. Raja Bone memutuskan untuk berdiam diri di dalam rumah. Tindakan ini mendapat reaksi dari Dewan Ade Pitu, dan diputuskan menurunkan Raja Bone dari Tahtanya. Keputusan itu disampaikan oleh To Alaungeng.³

Meskipun Dewan Ade Pitue menolak untuk menerima Islam, namun masyarakat di Kerajaan Bone tidak seluruhnya bersikap menolak untuk menerima Islam. Dalam banyak hal, masyarakat yang berada di Kerajaan Bone sudah bersentuhan dengan agama Islam sejak sekian lama. Oleh kerana itu, perlawanan yang dilakukan oleh Bone, La Tenri Ruwa juga hanya sekadar menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya oleh Dewan Ade Pitue. Melihat jalannya perang Mususelleng yang berlangsung singkat dan

¹Abu Hamid, *Syekh Yusuf: Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*. (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 218.

²Abdul Razak Daeng Patunru. *et. al. Sejarah Bone*. (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. 1993), h. 33.

³Abdul Razak Daeng Patunru. *et. al. Sejarah Bone*, h. 109.

juga penyebaran agama Islam yang begitu pesat di Bone, diperkirakan bahwa penolakan Dewan Ade Pitue terhadap Islam dikeranakan adanya kekhuatiran dari Dewan Ade Pitue dalam mempertahankan kekuasaannya dan adanya kekhuatiran untuk dijadikan yang berada dibawah kekuasaan Gowa.

Tindakan yang dilakukan oleh Raja Bone itu mendapat reaksi dari Dewan Ade Pitue, yang mengadakan musyawarah dan memutuskan untuk menuzulkan raja Bone, La Tenri Ruwa dari tahtanya.⁴ Dengan dinuzulkannya La Tenri Ruwa dari tahtanya, bedasarkan hasil musyawara ditunjuklah La Tenri Pale Tuakkepeang, Arung Timurung sebagai Raja Bone ke 12.⁵ Sultan Alauddin yang mengetahui La Tenri Ruwa telah diturunkan dari tahtanya, mengutus Karaeng Pettuang bersama sejumlah pasukan Kerajaan Gowa ke Pattiro untuk menjemput dan melindungi La Tenri Ruwa beserta keluarganya. Kedatangan La Tenri Ruwa di Palette di sambut oleh raja Gowa Sultan Alauddin, Raja Bone La Tenri Ruwa yang telah memeluk agama Islam akhirnya diberi gelar Adamulmarhum Kalinul Islam.

Sebagaimana uraian terdahulu bahawa relain menuzulkan rajanya, Namun pada awalnya terjadi penolakan Bone dalam menerima agama Islam, Bone juga memperlihatkan tingkah laku yang menentang Gowa. Keadaan yang demikian inilah yang dijadikan sebagai alasan Kerajaan Gowa memutuskan untuk menyerang kerajaan Bone. Perang ini diakhiri dengan kekalahan di pihak Kerajaan Bone.⁶ Sebagaimana biasanya, setelah suatu kerajaan dikalahkan, maka raja dan rakyatnya memeluk Islam. Demikian halnya kerajaan Bone, setelah dikalahkan dalam perang, Raja Bone La Tenri Pale Tuakkepeang, bersama rakyatnya secara rasmi masuk Islam pada hari Selasa, tanggal 23 November 1611 M/23 Ramadhan 1020 H., sebagaimana disebutkan dalam Lontara' Bilang atau Dag Boek (Catatan Harian) Raja Gowa-Tallo. Setelah Kerajaan Bone dapat ditaklukkan dan rasmi memeluk agama Islam, maka perang pengislaman yang dilakukan oleh Gowa dapat dianggap sudah berakhir. Penerimaan Islam oleh kerajaan Bone memberikan erti tersendiri bagi kerajaan Gowa, sebab untuk pertama kalinya Gowa dapat menguasai kerajaan-kerajaan Bugis secara keseluruhan.⁷

Adapun perkembangan kerajaan dan negeri Bone setelah Islam masuk ke negeri ini sebagaimana yang tercatat dalam lontarak Patturiolowanganri Gowa dan Patturiolowanga. Menurut sumber allo maupun dalam Lontarak Bugis di Wajo, Soppeng dan Bone. Menurut Lontarak-Lontarak ini, kekalahan negeri Bone di dalam peperangan Islam (Istilah musu Selleng dimana pemerintahan raja Gowa ke 14, tidak membawa perubahan apa-apa negeri Bone, melainkan dalam satu hal, iaitu rakyat dan raja Bone beserta seluruh anggota hadatnya ketika itu secara rasmi mengakui menerima

⁴Mattulada, *Menyusuri Jejak-Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah 1510-1700*. (Ujung Pandang: Bhakti Baru, 1982), h. 42.

⁵A. M. Ali, *Bone Selajang Pandang*. (Watampone: Dikbud Kab. Bone, 1969), h 27.

⁶A. M. Ali, *Bone Selajang Pandang*, h. 28.

⁷J. Noorduyn, *De Islamisering van Makassar dalam BKI, No.112*. (1956), h. 76.

Islam, sebagai agama dan kepercayaan yang berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaan Bone. Dengan kata lain, peristiwa kekalahan kerajaan Bone dalam perang melawan Gowa pada masa itu tidak menyebabkan berubahnya jawatan dan struktur kepemimpinan kerajaan, malahan kerajaan dan negeri Bone ketika itu hanya dijadikan salah satu sahabat atau saudara kenegaraan bagi kerajaan dan negara Gowa.

B. Kedudukan dan Posisi Raja setelah Menerima Islam

Peranan raja pada awal penerimaan Islam di Kerajaan Bone dapat dilihat pada penerimaan dan penyebaran Islam yang dimulakan oleh raja. Dalam masyarakat yang mengenal pelapisan sosial yang tertutup, status seseorang menjadi sangat penting. Status sosial berpengaruh dalam menentukan tingkat kekuasaan dan kekayaan seseorang. Raja atau Mangkau dalam kerajaan Bone, menduduki puncak piramid dalam struktur sosial. Pensyaratan utama untuk dilantik sebagai raja atau Mangkau adalah yang harus berasal dari keturunan bangsawan murni, iaitu keturunan langsung dari Tomanurung. Kehadiran Tomanurunge dimaksudkan untuk bertindak sebagai penyelamat, menciptakan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Tomanurunge dipercayai berasal dari Tuhan, oleh yang demikian, perintah dan larangannya tidak boleh dilanggar.⁸

Dalam konsep politik ketatanegaraan kerajaan Bone, raja mempunyai kedudukan yang amat tinggi, bahkan dipersonifikasikan dengan Dewa, yang sesuai dengan konsep *to manurung* masyarakat Bone. Oleh kerana itu jika dihubungkan dengan teori Azyumardi Azra mengenai penguasa dan rakyat, sekiranya berlaku pengkhianatan atau kedurhakaan kepada raja, ia akan dipandang sebagai salah satu dosa besar.⁹

Kedudukan Raja Bone setelah masuknya Islam yakni raja yang diangkat diberi gelar Sultan dalam pemerintahan dan tetap ada lembaga khusus menangani soal-soal keagamaan, rumah ibadah secara langsung diawasi oleh kerajaan, La Maddaremmeng sebagai Arungpone semasa itu terkenal sebagai raja yang melaksanakan ajaran Islam secara murni dan berlanjutan. Lontara Bone menyebut bahawa Raja Bone La Maddaremmeng sangat keras menjalankan perintah syariat Islam perintahnya antara lain ia mengeluarkan perintah semua hamba sahaya “*ata*” yang tidak tergolong turun temurun harus dimerdekakan atau dilayani sebagai pekerja yang memperoleh upah yang pantas. Perkara ini diceritakan dalam *Lontara* sebagai berikut:

*Ia'na mapparentangngi ri tau Bone pamaradekai sininna ata Rialae ri musue,
kuaetopa ata ridoirie ia muata manue mennennungeng wedding mui Ri Puata*

⁸Errington, J.J., *Shifting Languages: Interaction and Identity in Javanese- Indonesia Discipline and Punish*. (London: Penguin, 1977), h. 42.

⁹Azyumardi Azra, *Renaissance Islam di Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 8-82.

*anae ri agi lese Bolae. Padatosa si ajingnge iamani turusiwi parentana ritu maserroi manggelli.*¹⁰

Ertinya:

Ia memerintahkan kepada orang Bone supaya ia memerdekakan seluruh hamba (orang) yang dianggap selama dalam perang, begitu pula hamba sahaya yang dibeli, namun yang hanya bisa diperhamba kecuali hamba yang dipelihara dalam rumah saja. Sebagaimana yang dianggap keluarga yang taat pada pemerintah dan menjauhi yang dilarang.

Kebijaksanaan La Maddaremmeng itu memunculkan tentangan dari kalangan bangsawan yang dipimpin oleh ibu baginda sendiri We Tenrisoloreng Makkalarue yang juga memerintah sebagai Datu di Pattiro. Datu Pattiro mengumumkan bahawa beliau lebih memilih aliran Islam yang dipergunakan oleh raja Gowa Tallo daripada doktrin sufi yang mistik dan fanatik yang diperintahkan oleh La Maddaremmeng. Para penentang itu menghimpun kekuatan di bawah pimpinan ibunda La Maddaremmeng. Lalu La Maddaremmeng memerintahkan menggempur mereka di Pattiro yang dijadikan sebagai basis pertahanan. Oleh kerana merasa tidak cukup kuat menghadapi gempuran itu, Datu Pattiro pun bersama para bangsawan dan penentang lainnya meninggalkan Pattiro melarikan diri ke Gowa untuk meminta perlindungan guna meniadakan tekanan ajaran Islam yang ortodoks di Bone. Pada mulanya Gowa tidak terlalu tertarik akan permintaan Datu Pattiro itu, tetapi setelah La Maddaremmeng bermaksud untuk mengeksport ajaran Islam ortodoks dengan kekerasan ke Wajo', Soppeng, Massepe (Sidenreng), Sawitto, dan Bacukiki, maka sadarlah raja Gowa, Sultan Malikus Said dan Mangkubimunya bahawa tindakan La Maddaremmeng itu bukan saja berunsurkan agama, tetapi sudah menyangkut usaha Bone untuk merebut hegemoni kekuasaan Gowa di Sulawesi Selatan.

Apa yang akan disebutkan disini selain dari keteguhan La Madaremmeng yang menyebabkan tidak ragu menyebarkan dan melaksanakan ajaran Islam di dalam wilayah kerajaannya, yang menyebabkan dia bersedia membela kebijaksanaannya menghapuskan perbudakan dengan peperangan yang sengit yang berlangsung hampir satu tahun lamanya, pada tahun 1644 M. Beliau tertangkap di Cimpu, lalu beliau di tawan dan dibawa ke Gowa dan dasingkan di Desa Sanrangang¹¹ pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 1644

Kedudukan dan posisi La Madaremmeng dalam menyebarkan pelaksanaan ajaran Islam ortodoks dalam elit kerajaan Bone A. Rahman Rahim mengemukakan bahawa:

Apakah ertinya apabila La Madaremmeng sebagai Raja Bone ke-13 yang berusaha menghapuskan perbudakan sebagai salah satu pelaksanaan ajaran

¹⁰Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 372.

¹¹Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. (Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2011), h. 135.

Islam yang dipeluknya dengan taat, harus diperangi oleh Gowa di bawah Sultan Malikussaid yang melanjutkan pimpinan Kerajaan Gowa, Sultan Alauddin, ayahnya yang telah menyampaikan Islam ke Bone. Pastilah bahwa tindakan Gowa itu bukan kerana hendak menumpas usaha pelaksanaan ajaran Islam. Gowa adalah pelopor pengislaman di negeri-negeri Bugis. Rupanya politik yang ikut main, iaitu usaha untuk menaklukkan Bone di bawah Gowa. Kalau ini yang menjadi sebabnya, maka kepeloporan tadi telah dikalahkan oleh kepentingan politik. La Madaremmeng telah melakukan suatu usaha yang utama.¹²

Melihat dari kegiatan raja-raja setelah menerima Islam di Kerajaan Bone tidak terlepas dari usaha usaha mereka selaku penguasa dalam kepemimpinannya. Namun dalam pelapisan sosial tetap membawa implikasi yang lebih jauh antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Raja tetap mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif yang dimiliki raja semakin menambah akumulasi kekuasaannya yang sekaligus berdampak pada kedudukannya sebagai penguasa tertinggi.

Kekuasaan raja tersebut diatas juga boleh dilihat pada pemilikan sumber daya alam, seperti tanah dan sawah, bahwa masyarakat lapisan bawah hanya boleh memiliki sawah atau tanah yang tidak subur, sebagaimana juga dikemukakan oleh Bakkers di bawah ini:

Tanah, setidaknya sawah-sawah, sebahagian besar menjadi milik raja. kerabatnya, *hadat*, para pangerang serta orang-orang penting, sawah-sawah yang dimiliki orang-orang kecil pada umumnya adalah yang paling jelek dan paling tidak produktif.¹³

Posisi raja yang menguasai sumber daya alam tersebut juga turut menopang dan memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin yang kharismatik. Raja atau Mangkau yang diyakini berasal dari keturunan Tomanurunge, dipandang oleh masyarakat selaku wakil Tuhan di bumi posisi yang demikian tinggi membuat orang selalu memberikan penghormatan dan ketaatan tertentu kepada rajanya. Hal ini adalah lumrah pada masa yang di dalamnya berlaku "*Coius region eius religio*"¹⁴ yang bererti, "siapa yang mempunyai negeri, dia punya agama," maksudnya rakyat tunduk dan mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Setelah Islam mengalami perkembangan di wilayah kerajaan Bone maka sedikit demi sedikit terjadi pergeseran bahwa sekarang ini yang dianggap

¹²Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h. 165.

¹³Boechari, *Sedjarah Masuknja Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*. (Jakarta: Publicita, 1971), h. 131.

¹⁴Muller Kruger, *Sedjarah Geredja di Indonesia*. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959), h. 20. Bandingkan dengan Noorduyn, J. *Sedjarah Agama Islam di Sulawesi Selatan*, dalam W.B. Sidjabat Noorduyn, J. (ed), *Panggalam Kita di Indonesia Dewasa Ini*. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1964), h. 87.

penguasa tertinggi bukan lagi dari keturunan raja melainkan kekuasaan dalam partai politik yang terpilih dalam ruang lingkup kepala daerah (Bupati).

C. Islam dalam Kehidupan Sosial

Ketika Islam menjadi agama rasmi di kerajaan Bone, beberapa perubahan telah terjadi dalam tingkatan sosial secara berangsur-angsur. Perubahan ini semakin jelas ketika *sara* (hukum Islam) menduduki tempat penting dalam masyarakat. Penghapusan *ata* (sahaya) yang prosesnya dimulai oleh Raja Bone Ke 13, La Maddaremmang Sultan Muhammad Saleh.¹⁵ Meskipun dalam perkembangannya masyarakat saat ini masih mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan sosial masyarakat atas dibahagi menjadi dua lapisan iaitu bangs Awan (puang/andi) dan non bangsawan (orang biasa).

Hal tersebut dapat kita lihat dari stratifikasi sosial salah satu dari tingkatan sosial sudah tidak ada lagi iaitu tingkat ketiga yang disebut "Ata" (hamba). Ini dikeranakan pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi kerajaan khususnya di kerajaan Bone, walaupun masih ada sebahagian kecil masyarakat yang masih berpegang teguh pada status sosial. Lapisan bangsawan merupakan lapisan tingkatan yang teratas.¹⁶ Pada lapisan bangsawan yang pernah memegang jabatan dalam istana kerajaan dahulu dianggap oleh masyarakat lebih tinggi kedudukannya dari yang tidak pernah menduduki suatu jawatan dalam pemerintahan kerajaan.

Penerimaan Islam di kerajaan Bone dan masuknya syari'at Islam yang menjadi sebahagian dari integral dalam *Pangngadereng*, maka pranata-pranata sosial masyarakat Bone, memperoleh warna baru. Ini kerana *sara* (syariat) telah memberikan peranannya dalam berbagai tingkah laku kehidupan sosial budaya. Perlu diakui bahawa kehadiran Islam tidak banyak merubah nilai-nilai, kaedah-kaedah kemasyarakatan sehingga adat istiadat pra Islam, sebahagian masih tetap dilestarikan. Kehadiran Islam dalam kerajaan Bone lebih kepada menambah dan memperkaya budaya. Dengan demikian yang tampak di sini adalah terjadinya negosiasi antara syariat Islam dengan tradisi-tradisi lokal.¹⁷

Penetrasi Islam dalam masalah kewarisan misalnya tidak berbeza dengan aqiqah, perkahwinan, dan upacara-upacara kematian, iaitu mengambil bentuk negosiasi. Pengaruh Islam dilaksanakan secara bersama-sama dengan tradisi-tradisi pra Islam yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga melahirkan bentuk budaya baru. Teori Islamisasi seperti ini, sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Taufik Abdullah, iaitu pola konversi melalui pusat kekuasaan lokal ke dalam kekuasaan Islam, pada pola ini peranan kerajaan sebagai jambatan Islamisasi

¹⁵Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h. 158.

¹⁶Yang termasuk lapisan bangsawan adalah mereka yang berasal dari keturunan raja (Karaeng, di Makassar) atau (Puang, di Bugis). lihat (Abdullah, 1985: 110).

¹⁷Pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial, akan mudah diketahui jika dilihat dari pelaksanaan upacara inisiasi (permulaan) dan siklus hidup (*rites de passage*). Untuk pembahasan lebih rinci lihat Ahmad M. Sewang 1997), h. 191. Lihat pula Yusri Abady, *mjnjjkk*. (1987), h. 156.

dan Islampun menjadi tradisi khas bagi masyarakat, seperti ungkapannya; Inilah tradisi dalam masa Islam, mengalami proses ortogenetik atau mempribumikan secara konseptual dan struktural Islam menjadi bahagian instrinsik dari sistem kebudayaan secara keseluruhan.¹⁸

Adapun dalam hal pranata politik, para mubaligh Islam tidak melakukan perubahan secara keseluruhan dalam pranata sosial. Adat istiadat dalam upacara siklus hidup pra Islam masih tetap berlangsung, sementara para mubaligh berusaha secara bertahap mengisi upacara kemasyarakatan dengan ajaran Islam. Hal ini tampak pada setiap upacara siklus kehidupan, antara kebudayaan Islam dan adat istiadat setempat terjadi suatu akulturasi, seperti dapat dilihat pada upacara-upacara, perkahwinan, kelahiran, kematian dan warisan.

Sebagaimana yang telah dipahami bawa agama merupakan unsur penting yang menentukan identitas suatu masyarakat. Oleh kerana itu, penerimaan Islam sebagai agama rasmi oleh kerajaan beserta seluruh masyarakat Bone merupakan peristiwa yang sangat penting. Dimana masyarakat kerajaan Bone sebelum menganut Islam mereka menganut kepercayaan yang disebut *Dewata Sewae* yang pada hakikatnya itulah Tuhan Yang Maha Esa, maka kepercayaan ini diintegrasikan kedalam Islam yang mempercayai adanya Tuhan itu hanya satu atau esa. Hal inilah yang menyebabkan sehingga penerimaan Islam dalam kerajaan Bone cepat berkembang dari segi kepercayaan identik dengan kepercayaan agama Islam namun pelaksanaannya yang berbeza. Penyebaran Islam dengan pendekatan singkretist tersebut, dengan menekankan persamaan antara Islam dengan kepercayaan lokal, sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh A.H. Johns¹⁹ yang menganggap bahawa keberhasilan konversi ke dalam Islam kerana adanya kemampuan dalam menyajikan Islam secara *attractive* yang menekankan kesesuaian Islam dengan kepercayaan atau amalan keagamaan lokal.

D. Kerajaan Bone dan Pengaruh Islam dalam Struktur Kerajaan

Penerimaan penguasa terhadap Islam telah mempermudah rakyat mereka untuk menukar agama dan mengikuti jejak rajanya. Penerimaan ini sama ada berlangsung secara suka rela atau secara formal apabila raja telah mendekritkan Islam sebagai agama rakyat dan negaranya. Contohnya Raja Bone ke 12, Latenri Pale setelah menerima Islam kemudian menyatakan bahawa seluruh masyarakat wilayah kerajaannya telah menjadi Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi kerajaan.

¹⁸Hamid Abdullah, *Musu' Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo*, dalam *Bingkisan Bunga Rampai Budaya No. 1*. (Ujung Pandang: YKSS/Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. 1988), h. 83

¹⁹A.H. Johns, *Sufism as a Category in Indonesian Literature and History*, *JSEAH*, 2, II. 1961, h. 10-15.

Islam sebagai agama diterima sebagai agama rasmi kerajaan, maka Kerajaan Bone dibawah pemerintahan La Maddaremmeng, Sultan Muhammad Saleh (1631-1644), sebagai seorang raja yang komitmen, mulai menjalankan pemerintahannya dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Antara langkah awal yang dilakukan adalah mengangkat seorang qadhi atau hakim agama kerajaan yang disebut *Qadhi* yang bertanggung jawab mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat sekaligus sebagai penasihat raja. Selanjutnya, untuk lebih mengukuhkan pranata keIslaman, qadhi telah dimasukkan ke dalam lembaga atau kabinet pemerintahan. Dari segi amalan pada zaman pemerintahan La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh (1631-1644) telah mengubah kabinet dengan memasukkan pranata keIslaman ke dalam kabinet pemerintahannya atau dengan kata lain baginda bukan merombak *Pangngadereng* (sistem kebudayaan masyarakat), tetapi melengkapinya dengan memasukkan unsur-unsur Islami.²⁰

Dalam struktur pemerintahan tidak dilakukan perombakan, melainkan dilengkapi dengan memasukkan pranata atau lembaga Islam ke dalam struktur pemerintahan, seperti tugas Qadhi yang menangani urusan pengembangan dan pemantapan syariat Islam. Tugas Qadhi adalah memperdalam pengetahuannya dalam bidang syariat Islam dan syarat-syarat pengangkatan Qadhi pada masa itu didasarkan atas “abhatireng”, sama dengan keturunan, keilmuan atau keahlian di bidang hukum syariat. Sedang bissu tetap berada dalam lingkungan istana dengan tugas khusus menangani dan merawat benda-benda arajang di samping melaksanakan pengobatan tradisional. Disamping itu raja-raja mempergunakan nama-nama Islam dengan meletakkan gelaran Sultan didepan namanya.²¹

Pada masa pemerintahan La Maddaremmeng, benih Islam telah tumbuh sedikit demi sedikit di tanah Bone, dan Islam telah merata dikalangan masyarakat, La Maddaremmeng yang menduduki tahta kerajaan sebagai Raja Bone ke 13 yang menggantikan pamannya La Tenri Pale, raja ini berusaha mengangkat kedudukan Islam dengan jalan mengembangkan struktur pemerintahan Kerajaan Bone. Maka struktur pemerintahan ditambah lembaga yang disebut *parewa sara'* (pejabat syariat), yang berkedudukan dalam kerajaan Bone sama dengan *parewa ade'* (pejabat adat). Penunjukan *parewa sara'* dipimpin oleh seorang *kalie (qadhi)*, iaitu pejabat tertinggi di bidang hukum syariat Islam dan berkedudukan di pusat kerajaan. Ditingkat *palili'* diangkat pejabat bawahan yang disebut dengan *imam* serta dibantu oleh seorang *katte (khatib)* dan seorang *bilala (bilal)*. Dalam perkembangannya lembaga *parewa sara'* mengikuti lembaga pejabat adat, mulai dari tingkat kerajaan sampai tingkat kampung.

²⁰Menelusuri bentuk pemerintahan monarki La Maddaremmeng tersebut di atas dapat dilihat bahwa La Maddaremmeng telah membentuk sistem pemerintahan kedalam tiga monarki yakni monarki apslut, monarki parlementer dan monarki konstitusional yang masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Lihat Sitanggang (1998), h. 133-136

²¹Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), h. 385,

Dengan dipadukannya *sara'* dengan adat dalam struktur Kerajaan Bone, agak wajarlah jika dalam kerajaan Bone terdapat ahli mengenai agama, di samping terdapat ahli dalam urusan pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Bone, *kalie* adalah kepala segala pejabat *sara'* dan juga kepala peradilan agama tertinggi serta kedudukannya merupakan salah satu kelengkapan kerajaan. Bahkan Raja Bone (Mangkau) meminta fatwa kepada Kadhi khususnya menyangkut hukum Islam, meskipun demikian raja adalah penghulu agama tertinggi dalam kerajaan. Kedudukan ini menjamin kekuasaan di tangan raja dalam bidang keagamaan.

Begitu pentingnya lembaga *sara* dalam struktur pemerintahan kerajaan Bone, maka dalam setiap musyawarah besar dewan adat, kedudukan pejabat *sara'* disamakan dengan pejabat adat. Hal ini terbukti dari komposisi tempat duduk, pada bahagian sebelah kanan raja duduk berdampingan pejabat-pejabat *sara* dan pada sisi sebelah kiri duduk pejabat-pejabat adat secara berdampingan pula berhadap-hadapan dengan pejabat *sara*, sedangkan *arung matowa* duduk di tengah berdampingan pula dengan *kali*, sehingga membentuk segi empat. Dalam musyawarah besar dewan adat tersebut, posisi *kali* merupakan pencepat dan penentu kebijaksanaan yang menyangkut hal-hal keagamaan dalam sistem sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan tentang komposisi para pejabat kerajaan setelah dipengaruhi oleh unsur Islam sebagai berikut:

1. *Arumpone* atau *mangkau*, bersama seorang *pakkada* iaitu *Makkedangnge tanah* yang berkedudukan sebagai raja muda atau Mangkubumi, yang menempati pusat kekuasaan yang lebih banyak bersifat pertikuler, raja yang lemah melahirkan tokoh-tokoh seperti *petta makkedangnge tanah*, *tomarilaleng* dan anggota *ade pitu* lainnya.
2. *Ade pitu* dibawah koordinasi *To Marilaleng* adalah Dewan Menteri Tanah Bone yang menjalankan pemerintahan sehari-hari tampilnya tokoh-tokoh unggul antara rakyat dari dalam dewan ini sangat bergantung pada bagaimana persetujuan raja yang sedang memerintah. Disamping *To Marilaleng*, diadakan pula jabatan *To Marilaleng Lolo*, yang bertugas mengawasi daerah-daerah yang diperintah oleh para *Arung Palili* sebagai penguasa daerah.
3. *Ponggawa* ialah panglima angkatan perang kerajaan yang bertugas menyusun kekuatan pertahanan negara, dibawah kekuasaan raja. Di bawah pimpinan *pongawa* yang lazim disebut *petta poggawaE* yang terdapat tiga panglima bawahan yang disebut *dulung*, iaitu:
 - a. *Dulung Awang Tangka* iaitu panglima yang berkuasa atau yang menguasai daerah perairan.
 - b. *Dulung Ajang Ale* iaitu panglima yang menguasai daratan.
 - c. *Dulung Lamuru* iaitu panglima yang mengawasi daerah perbatasan. Dibawah *dulung-dulung* ini terdapatlah *pangulu jowai* atau *anre guru jowa* sebagai pemimpin-pemimpin pasukan atau laskar.

4. *Qadhi (kali)* biasa disebut *petta kalie* adalah penghulu agama Islam yang menjalankan aspek *panggadereng* yang disebut *syara'* iaitu pelaksana Islam dalam kehidupan Negara.²²

Selain pembahasan tersebut di atas juga dapat dilihat melalui ungkapa dari Lontara Bone tentang jabatan pemerintahan Kerajaan Bone, sebagai berikut:

- a. Menurut Mattulada²³ orang Bugis khususnya Bone menyebut rajanya dengan Petta Mangkaue ri Bone (Tuanku yang berdaulat di Bone) dibantu oleh suatu dewan pemerintahan yang disebut Ade' Pitu yang diketuai oleh Petta Tomarilaleng, Arung Pitu mempunyai tugas masing-masing iaitu Arung Macege bertugas dalam urusan pembangunan dan pekerjaan umum, Arung Tanete Riawang bertugas dalam urusan kewangan dan ekonomi, Arung Ta bertugas dalam urusan pendidikan dan pengajaran.
- b. Menurut Abdul Rahman, pejabat Sara, disebut Parewa Sara, diberi kedudukan dalam kerajaan dengan tugas dibidang keagamaan. Parewa Sara dipimpin oleh seorang Khadi iaitu pejabat yang tertinggi di bidang keagamaan atau hukum syariat Islam yang berkedudukan dipusat kerajaan, tiap Palili diangkat pejabat bawahan yang disebut dengan Imam yang dibantu oleh seorang khatib dan seorang Bilal.
- c. Menurut Andi Mappasissi bahawa, raja sebagai penguasa dalam kerajaan Bone yang dibantu oleh Tomarilaleng yang bertugas membantu raja dalam urusan-urusan pemeritahan kedalam termasuk urusan pemerintahan Istana dan Makadeng Tanah yang bertugas sebagai pembantu Raja dalam mengatur urusan-urusan pemerintahan keluar termasuk hubungan dengan kerajaan lain, Tomarilaleng dan Makadeng Tanah dibantu oleh Matowa (Matowa Pitu) dalam pengembangan system pemeritahan Bone selanjutnya Matowa Pitu berubah menjadi Ade' Pitu atau Arung Pitu To Marilaleng.

Dari keterangan Lontara Bone tersebut di atas tentang jabatan pemerintahan Kerajaan Bone ditarik kesimpulan bahawa stuktur pemerintahan Kerajaan Bone, iaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi terletak ditangan raja disebut *Makadeng tanah* (sebagai menteri Luar Negeri) kemudian membawahi Tomarilaleng Lolo bertugas mengawasi daerah bawahan yang disebut Arung Palili atau Sullewatang, panglima perang disebut Ponggawa iaitu suatu jabatan baru mengenai bidang pertanian kerajaan, dibawahnya terdapat jabatan pasukan yang disebut Petta Kalie, qahadi ditingkat Kecamatan terdapat imam dan guru kampong ditingkat Desa masing-masing mengurus wilayahnya dibantu oleh seorang Khatib dan Bilal yang bertugas pada tempat ibadah seperti masjid atau mushallah.

²²Amir Sessu, *Lontara Akkarungeng Bone*, (Transkrip Kandepdikbud Kabupaten Bone, 1985), h. 76-78.

²³Mattulada, *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 428-429.

E. Kesimpulan

Proses penerimaan Islam di kerajaan Bone pada awalnya tidak terlepas dari proses Islamisasi di kerajaan Gowa, yang mana proses Islamisasi kerajaan Gowa, dilakukan oleh Datu ri Bandang yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin setelah Islam diterima secara resmi oleh Kerajaan Gowa. Adapun setelah Islam masuk dan berkembang pada kerajaan Bone kedudukan Raja Bone mulai berubah baik dari segi struktural maupun spasial yakni raja yang diangkat diberi gelar Sultan dalam pemerintahan dan tetap ada lembaga khusus menangani soal-soal keagamaan, rumah ibadah secara langsung diawasi oleh kerajaan, La Maddaremmeng sebagai Arungpone semasa itu terkenal sebagai raja yang melaksanakan ajaran Islam secara murni dan berlanjutan. Namun dalam pelapisan sosial tetap membawa implikasi yang lebih jauh antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Raja tetap mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif yang dimiliki raja semakin menambah akumulasi kekuasaannya yang sekaligus berdampak pada kedudukannya sebagai penguasa tertinggi.

Pada masa pemerintahan La Maddaremmeng, benih Islam telah tumbuh sedikit demi sedikit di tanah Bone, dan Islam telah merata dikalangan masyarakat, La Maddaremmeng yang menduduki tahta kerajaan sebagai Raja Bone ke 13 yang menggantikan pamannya La Tenri Pale, raja ini berusaha mengangkat kedudukan Islam dengan jalan mengembangkan struktur pemerintahan Kerajaan Bone. Maka struktur pemerintahan ditambah lembaga yang disebut *parewa sara'* (pejabat syariat), yang berkedudukan dalam kerajaan Bone sama dengan *parewa ade'* (pejabat adat). Penunjukan *parewa sara'* dipimpin oleh seorang *kalie (qadhi)*, iaitu pejabat tertinggi di bidang hukum syariat Islam dan berkedudukan di pusat kerajaan. Ditingkat *palili'* diangkat pejabat bawahan yang disebut dengan *imam* serta dibantu oleh seorang *katte (khatib)* dan seorang *bilala (bilal)*. Dalam perkembangannya lembaga *parewa sara'* mengikuti lembaga pejabat adat, mulai dari tingkat kerajaan sampai tingkat kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak Daeng Patunru. *et. al. Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. 1993.
- Abdullah, Hamid, *Musu' Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo*, dalam *Bingkisan Bunga Rampai Budaya No. 1*. Ujung Pandang: YKSS/Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. 1988.
- Ali, A. M., *Bone Selajang Pandang*. Watampone: Dikbud Kab. Bone, 1969.
- Azra, Azyumardi, *Renaisans Islam di Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

- Boechari, *Sedjarah Masuknja Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*. Jakarta: Publicita, 1971.
- Errington, J.J., *Shifting Languages: Interaction and Identity in Javanese- Indonesia Discipline and Punish*. London: Penguin, 1977.
- Hamid Abu, Syekh Yusuf: *Seorang Ulama Sufi dan Pejuang*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- J. Noorduyn, *De Islamisering van Makassar dalam BKI, No.112*. 1956.
- Johns, A.H., *Sufism as a Category in Indonesian Literature and History, JSEAH, 2, II*. 1961.
- Kruger, Muller, *Sedjarah Geredja di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959.
- Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995.
- _____, *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
- _____, *Menyusuri Jejak-Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah 1510-1700*. Ujung Pandang: Bhakti Baru, 1982.
- Noorduyn, J. *Sedjarah Agama Islam di Sulawesi Selatan*, dalam W.B. Sidjabat Noorduyn, J. (ed), *Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1964.
- Rahim, Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2011.
- Sessu, Amir, *Lontara Akkarungeng Bone*, Transkrip Kandepdikbud Kabupaten Bone, 1985.
- Sewing, M. Ahmad, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

